



## Pemikiran Politik Islam di Indonesia: Menggali Dimensi Substantif dalam Wacana Formalistik

Rachmat Panca Putera

Universitas Islam Lampung, Indonesia

Jl. Brigjen Sutyoso No. 7 Kota Metro Lampung

Korespondensi penulis: [rachmatpancaputra9@gmail.com](mailto:rachmatpancaputra9@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to examine the shift in Islamic political thought in Indonesia, from a formalistic approach to a substantive one, as well as the factors that drive this change. The formalistic approach, which emphasizes symbols and the rigid application of Islamic law in the state structure, is increasingly seen as irrelevant to the social-political dynamics of plural Indonesia. In contrast, the substantive approach, which focuses on achieving the social goals of Islam, such as justice and welfare, is considered more adaptable to the needs of modern society. This research uses a qualitative method with a literature review approach, analyzing various relevant sources to identify the paradigm shift in Islamic political thought. The findings indicate that this shift is largely influenced by social developments and political challenges faced by Indonesian society. The implications of these findings highlight the importance of adopting a substantive approach in formulating inclusive public policies that can strengthen social harmony in Indonesia. This approach also offers a new foundation for the development of Islamic political thought that is more relevant to the challenges of the times.*

**Keywords:** *Islamic, Public Policy, Islamic Politics, Substantive, Formalistic.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pergeseran pemikiran politik Islam di Indonesia, dari pendekatan formalistik menuju substantif, serta faktor-faktor yang mendorong perubahan tersebut. Pendekatan formalistik, yang lebih menekankan pada simbol-simbol dan penerapan hukum Islam secara kaku dalam tatanan negara, mulai dianggap tidak relevan dengan dinamika sosial-politik Indonesia yang plural. Sebaliknya, pendekatan substantif, yang lebih berfokus pada pencapaian tujuan-tujuan sosial Islam seperti keadilan dan kesejahteraan, dianggap lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis literatur, mengolah berbagai sumber yang relevan untuk mengidentifikasi perubahan paradigma dalam pemikiran politik Islam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pergeseran ini lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan sosial dan tantangan politik yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya pendekatan substantif dalam merumuskan kebijakan publik yang lebih inklusif dan dapat memperkuat harmoni sosial di Indonesia. Pendekatan ini juga menawarkan landasan baru untuk pengembangan pemikiran politik Islam yang lebih relevan dengan tantangan zaman.

**Kata Kunci:** Islam, Kebijakan Publik, Politik Islam, Substantif, Formalistik.

### 1. LATAR BELAKANG

Dalam beberapa dekade terakhir, pemikiran politik Islam di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan, terutama dalam merespons dinamika sosial dan politik yang semakin kompleks. Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, menyaksikan perdebatan panjang antara pemikiran politik Islam yang bersifat formalistik dan yang berorientasi substantif. Pendekatan formalistik, yang menitikberatkan pada simbolisme hukum dan institusi Islam, telah lama menjadi rujukan utama dalam wacana politik Islam di Indonesia. Namun, seiring berkembangnya tantangan modern seperti pluralisme, keadilan sosial, dan pemerataan kesejahteraan, pendekatan ini dinilai belum cukup efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Di tengah tantangan tersebut, pemikiran politik Islam yang berorientasi substantif semakin mengemuka, menawarkan perspektif yang lebih inklusif dan berfokus pada nilai-nilai dasar Islam, seperti keadilan, kesejahteraan, dan kesetaraan. Pendekatan substantif ini tidak sekadar memperjuangkan simbol agama, melainkan menempatkan Islam sebagai fondasi bagi kebijakan yang berpihak pada kepentingan bersama, tanpa menimbulkan segregasi atau konflik ideologis. Transformasi ini tidak hanya mencerminkan respons intelektual terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi juga membawa angin segar bagi keberagaman sosial-politik di Indonesia.

Kajian ini hadir untuk mendalami transformasi pemikiran politik Islam di Indonesia dari pendekatan formalistik menuju substantif, serta menggali dampaknya terhadap stabilitas sosial dan pembangunan masyarakat. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana pemikiran substantif dapat menjadi alternatif dalam menghadirkan politik Islam yang relevan dan responsif terhadap tuntutan zaman, sekaligus tetap mengakar pada nilai-nilai dasar agama yang universal.

Pemikiran politik Islam di Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan, terutama sejak era reformasi yang memperluas wacana tentang hubungan Islam dan negara. Perdebatan yang sebelumnya didominasi oleh pendekatan formalistik, yaitu dengan menekankan penerapan simbol-simbol hukum Islam secara literal dalam kebijakan dan undang-undang, kini mulai bergeser ke arah pendekatan yang lebih substantif, yang berfokus pada nilai-nilai inti Islam seperti keadilan, kesejahteraan, dan pemerataan sosial. Misalnya, Effendi (2018) menyoroti bahwa perkembangan pemikiran politik Islam di Indonesia ditandai oleh semakin kompleksnya interaksi antara kebutuhan akan identitas Islam dengan tantangan modernisasi dan pluralitas. Pendekatan substantif ini dinilai lebih mampu merespons tantangan kontemporer, seperti isu kesetaraan sosial dan ketahanan ekonomi, yang tidak bisa sepenuhnya dijawab melalui pendekatan simbolik.

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa pendekatan formalistik dalam politik Islam kerap menjadi sumber perdebatan dalam masyarakat, terutama karena dianggap terlalu fokus pada simbol tanpa memperhatikan tujuan dasar dari hukum Islam itu sendiri. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Hasan (2015) mengungkapkan bahwa pendekatan formalistik cenderung bersifat eksklusif dan memicu resistensi dari kelompok non-Islam, yang memandangnya sebagai bentuk politisasi agama yang membahayakan persatuan bangsa. Dengan demikian, pendekatan formalistik dianggap kurang efektif dalam mengatasi tantangan-tantangan sosial-politik yang kompleks di Indonesia,

terutama dalam menjaga harmoni sosial. Menurut Ma'arif (2019), pendekatan ini juga sering kali tidak menyentuh inti masalah yang sebenarnya ingin diselesaikan, sehingga terjadi distorsi dalam implementasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik.

Meski demikian, terdapat kesenjangan dalam penelitian terkait pergeseran dari pendekatan formalistik ke substantif ini. Sebagian besar penelitian hanya terfokus pada kritik terhadap pendekatan formalistik tanpa memberikan perhatian yang cukup terhadap perkembangan pemikiran substantif yang justru semakin diminati di kalangan intelektual Islam di Indonesia. Padahal, terdapat urgensi untuk mengkaji lebih mendalam bagaimana pemikiran substantif ini diterapkan dalam kebijakan dan sistem politik di Indonesia, serta bagaimana pendekatan tersebut dapat membawa dampak positif bagi stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini selaras dengan temuan Supriadi (2020), yang menekankan bahwa pendekatan substantif berpotensi menjadi solusi dalam mewujudkan keadilan sosial tanpa memicu konflik ideologis yang berkepanjangan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai transisi dari pemikiran politik Islam formalistik ke substantif di Indonesia, serta implikasinya terhadap pembangunan masyarakat yang lebih inklusif.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam transformasi pemikiran politik Islam di Indonesia dari pendekatan formalistik menuju pendekatan substantif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam literatur tentang politik Islam di Indonesia, khususnya dalam hal mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong pergeseran paradigma tersebut dan mengapa pendekatan substantif dinilai lebih relevan dalam konteks Indonesia saat ini. Dengan menjadikan nilai-nilai Islam yang substansial sebagai fondasi kebijakan publik, diharapkan pemikiran politik Islam di Indonesia dapat semakin inklusif dan dapat menjawab kebutuhan sosial yang lebih kompleks (Supriadi, 2020).

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Dalam kajian politik Islam di Indonesia, terjadi pergeseran penting dari pendekatan formalistik menuju pendekatan substantif, yang memunculkan paradigma baru dalam pemikiran Islam kontemporer. Pergeseran ini bukan hanya sekadar perubahan pandangan, tetapi juga merupakan respons terhadap tantangan sosial dan politik yang dihadapi masyarakat Indonesia yang semakin plural. Pendekatan substantif dinilai lebih mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern, dengan menekankan nilai-nilai inti

Islam seperti keadilan dan kesejahteraan, serta menjembatani perbedaan ideologis dalam kerangka negara yang multikultural.

Kajian tentang pemikiran politik Islam di Indonesia kerap dimulai dari konsep pendekatan formalistik yang mendominasi wacana politik Islam dalam beberapa dekade terakhir. Pendekatan formalistik mengacu pada penerapan simbol-simbol Islam secara eksplisit dalam bentuk hukum atau aturan formal, seperti penerapan syariah atau aturan-aturan yang secara langsung diambil dari hukum Islam klasik. Menurut Hasan (2016), pendekatan formalistik seringkali dianggap sebagai sarana untuk mewujudkan identitas keislaman dalam tatanan negara, terutama di kalangan kelompok Islam politik yang ingin melihat representasi Islam secara legal-formal dalam sistem pemerintahan. Namun, dalam praktiknya, pendekatan ini kerap menuai tantangan karena seringkali terjebak dalam simbolisme yang kurang mampu merespon kebutuhan masyarakat modern yang semakin plural dan kompleks.

Sebagai respons terhadap keterbatasan pendekatan formalistik, muncul pemikiran politik Islam yang berorientasi substantif, yang mengutamakan esensi atau nilai-nilai dasar dalam Islam seperti keadilan, kesejahteraan, dan kesetaraan sosial. Konsep substantif ini tidak menekankan pada bentuk-bentuk formal dari hukum Islam, melainkan lebih pada tujuan dan nilai-nilai yang ingin dicapai oleh hukum tersebut. Effendi (2018) berpendapat bahwa pendekatan substantif menawarkan alternatif bagi politik Islam untuk lebih adaptif dalam konteks kebangsaan Indonesia yang multikultural, tanpa harus menabrak nilai-nilai dasar negara. Pendekatan ini membuka ruang bagi politik Islam untuk berperan dalam menegakkan nilai-nilai keadilan sosial dan kebijakan yang inklusif, yang menjadi kebutuhan mendasar bagi bangsa yang beragam seperti Indonesia.

Dalam studi pemikiran politik, perubahan dari pendekatan formalistik ke substantif sering dijelaskan menggunakan teori perubahan paradigma. Menurut teori ini, pergeseran paradigma terjadi ketika pemikiran lama tidak lagi memadai untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul, sehingga diperlukan pendekatan baru yang lebih relevan. Ma'arif (2019) menjelaskan bahwa dalam konteks politik Islam di Indonesia, pergeseran dari formalistik ke substantif ini dipengaruhi oleh tantangan-tantangan sosial seperti ketimpangan ekonomi, konflik sektarian, dan krisis kepercayaan terhadap institusi politik. Pergeseran paradigma ini menunjukkan bahwa politik Islam tidak lagi hanya berkuat pada simbol dan ritual, tetapi juga berupaya untuk lebih membumi dalam merespons kebutuhan masyarakat luas.

Dengan berkembangnya globalisasi dan demokratisasi, pendekatan substantif juga semakin relevan karena dianggap mampu menghadirkan Islam yang inklusif dan sesuai dengan semangat zaman. Supriadi (2020) menegaskan bahwa pendekatan substantif ini mampu meminimalisir konflik ideologis antara kelompok agama yang berbeda, serta dapat menjembatani kepentingan masyarakat yang beragam. Dalam konteks politik Islam di Indonesia, pendekatan substantif ini dipandang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern yang menuntut kebijakan berdasarkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama, daripada simbolisme agama yang bersifat eksklusif. Pendekatan ini juga berpotensi untuk memperkuat integrasi sosial dengan menempatkan Islam sebagai nilai universal yang relevan bagi semua lapisan masyarakat, baik Muslim maupun non-Muslim.

Sintesis dari kajian teoritis ini menunjukkan bahwa pendekatan formalistik dan substantif dalam pemikiran politik Islam memiliki peran dan tujuan yang berbeda dalam konteks Indonesia. Pendekatan formalistik berfokus pada penerapan simbol-simbol hukum Islam secara literal, namun seringkali terbatas dalam merespons dinamika sosial yang kompleks. Sebaliknya, pendekatan substantif hadir sebagai solusi alternatif, mengutamakan nilai-nilai dasar Islam yang lebih inklusif, seperti keadilan dan kesejahteraan, yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat multikultural. Dengan demikian, pendekatan substantif bukan hanya melengkapi, tetapi juga memperkaya pemikiran politik Islam agar lebih relevan dan adaptif terhadap tantangan modern.

### **3. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) untuk memahami secara mendalam pergeseran pemikiran politik Islam di Indonesia dari pendekatan formalistik ke pendekatan substantif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu menganalisis konsep dan teori yang telah berkembang dalam literatur mengenai politik Islam di Indonesia, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan paradigma tersebut. Studi pustaka memungkinkan penelitian untuk menggali, membandingkan, dan menganalisis berbagai literatur terkait topik ini secara mendalam.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui analisis dokumen yang meliputi buku, artikel ilmiah, dan publikasi lainnya yang relevan, khususnya dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Menurut Sugiyono (2017), metode studi pustaka efektif dalam penelitian yang bertujuan memahami konsep atau wacana yang sudah ada dengan cara menganalisis

sumber-sumber tertulis secara sistematis. Dalam konteks ini, sumber-sumber yang digunakan tidak hanya berasal dari literatur nasional, tetapi juga melibatkan literatur internasional untuk memperkaya perspektif dalam memahami transformasi pemikiran politik Islam di Indonesia.

Teknik analisis data dilakukan melalui langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sesuai dengan prosedur analisis kualitatif. Miles dan Huberman (2014) menjelaskan bahwa reduksi data penting untuk menyederhanakan data-data yang kompleks, sehingga hanya informasi yang relevan dan berhubungan langsung dengan tujuan penelitian yang diambil. Setelah proses reduksi, data disusun dan disajikan dalam bentuk narasi yang mendukung penjelasan tentang perubahan dari pendekatan formalistik ke substantif. Terakhir, peneliti menarik kesimpulan yang berfokus pada identifikasi dan pemahaman lebih dalam terhadap pergeseran paradigma tersebut.

Selain itu, keabsahan data dalam penelitian ini dijamin dengan menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai literatur untuk memastikan validitas temuan. Triangulasi ini bertujuan untuk mengurangi bias dan memastikan bahwa data yang diperoleh merepresentasikan kondisi dan wacana politik Islam di Indonesia secara objektif dan menyeluruh (Patton, 2015). Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis yang kuat terhadap pemahaman tentang pemikiran politik Islam yang lebih adaptif dan relevan dalam konteks sosial-politik Indonesia.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam analisis tentang perkembangan pemikiran politik Islam di Indonesia, ditemukan adanya pergeseran signifikan dari orientasi formalistik menuju pendekatan yang lebih substantif. Pergeseran ini bukan hanya mencerminkan perubahan strategi politik, tetapi juga menunjukkan respons kritis kalangan intelektual Muslim terhadap tuntutan sosial yang kian dinamis. Dalam konteks masyarakat yang beragam, pendekatan substantif menawarkan perspektif politik Islam yang lebih inklusif dan relevan untuk mencapai keadilan sosial serta kesejahteraan kolektif, sekaligus menghadirkan Islam dalam peran yang konstruktif dan adaptif di tengah kemajemukan.

Berdasarkan analisis dari berbagai literatur yang telah dikaji, ditemukan bahwa pergeseran pemikiran politik Islam di Indonesia dari pendekatan formalistik menuju substantif merupakan respons terhadap tantangan-tantangan sosial dan politik yang semakin kompleks. Transformasi ini terlihat dari perubahan orientasi sebagian besar

intelektual dan aktivis Muslim di Indonesia, yang beralih dari upaya untuk menerapkan syariah Islam secara formal dalam kebijakan negara, menuju penerapan nilai-nilai dasar Islam yang lebih substansial, seperti keadilan, kesejahteraan sosial, dan kesetaraan.

Pendekatan formalistik, yang pada awalnya mendominasi wacana politik Islam di Indonesia, kerap memfokuskan pada penerapan simbol-simbol dan hukum Islam dalam tatanan formal negara. Menurut Hasan (2016), pendekatan ini dinilai efektif dalam menunjukkan identitas Islam dalam ruang publik, namun seringkali memicu resistensi dari kelompok-kelompok lain dalam masyarakat yang menganggapnya sebagai upaya politisasi agama. Misalnya, upaya penerapan syariah Islam di beberapa daerah di Indonesia cenderung menimbulkan perdebatan tentang keberagaman ideologis dan pluralitas masyarakat. Pendekatan ini juga dianggap kurang efektif dalam menciptakan kondisi sosial yang harmonis, karena berfokus pada simbol ketimbang tujuan sosial Islam itu sendiri.

Sebaliknya, pendekatan substantif dianggap sebagai alternatif yang lebih relevan untuk merespons tantangan zaman. Effendi (2018) menyatakan bahwa pendekatan ini tidak hanya berusaha untuk memasukkan nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik secara eksplisit, tetapi lebih pada mencapai tujuan-tujuan dasar yang diamanahkan oleh Islam. Contohnya, dalam konteks kebijakan ekonomi, pendekatan substantif mendorong kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial dan pemerataan ekonomi, yang sejalan dengan tujuan syariah, tanpa harus menerapkan hukum syariah secara formal. Dalam konteks ini, nilai-nilai dasar Islam diterjemahkan ke dalam kebijakan-kebijakan yang inklusif dan relevan untuk masyarakat plural, sehingga mampu menjembatani berbagai kepentingan.

Analisis dari data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa pendekatan substantif dalam politik Islam di Indonesia lebih mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern yang multikultural. Supriadi (2020) menekankan bahwa pendekatan ini memungkinkan para intelektual Muslim untuk lebih fokus pada solusi nyata yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tanpa harus terjebak dalam simbol-simbol formal agama. Misalnya, dalam bidang pendidikan dan ekonomi, nilai-nilai Islam yang substantif seperti keadilan, kesejahteraan, dan tanggung jawab sosial diterapkan melalui program-program yang inklusif dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat, baik Muslim maupun non-Muslim. Dengan demikian, pendekatan substantif dalam politik Islam di Indonesia dapat berperan dalam memperkuat integrasi sosial dan mendorong terciptanya kebijakan yang lebih humanis.

Namun, penerapan pendekatan substantif ini tidak tanpa tantangan. Pergeseran paradigma dari formalistik ke substantif memerlukan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Islam yang mendasari kebijakan-kebijakan tersebut. Menurut Ma'arif (2019), salah satu tantangan terbesar adalah resistensi dari kelompok yang masih menganut pandangan formalistik, yang mungkin menganggap pendekatan substantif sebagai bentuk kompromi terhadap prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang lebih besar dari para intelektual dan pemimpin Muslim untuk mensosialisasikan pentingnya pendekatan substantif sebagai cara yang lebih relevan dan aplikatif dalam konteks Indonesia yang beragam.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan substantif dalam pemikiran politik Islam di Indonesia tidak hanya lebih relevan dalam menghadapi tantangan sosial-politik modern, tetapi juga lebih adaptif terhadap masyarakat yang multikultural. Dengan menempatkan nilai-nilai Islam sebagai fondasi kebijakan yang inklusif, pendekatan ini dapat membantu menciptakan lingkungan sosial yang lebih adil dan harmonis. Pendekatan substantif, dengan fokusnya pada nilai-nilai dasar yang inklusif dan universal, dapat menjadi solusi dalam menjembatani kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat tanpa menimbulkan konflik ideologis yang berkepanjangan.

Implikasi hasil penelitian ini dapat dibagi ke dalam dua aspek: teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya wacana tentang pemikiran politik Islam dengan menawarkan perspektif baru yang lebih kontekstual, adaptif, dan relevan dengan tuntutan masyarakat modern yang plural. Pendekatan substantif ini tidak hanya melengkapi, tetapi juga memperluas pandangan tentang bagaimana Islam dapat berperan dalam pembangunan sosial yang inklusif. Dalam perspektif teoritis, hasil ini dapat mendorong penelitian-penelitian lanjutan yang fokus pada pengembangan konsep politik Islam yang menekankan nilai-nilai universal Islam, seperti keadilan sosial dan kesejahteraan, sebagai landasan dalam pembangunan masyarakat yang harmonis.

Secara praktis, temuan ini memiliki implikasi besar bagi pembuat kebijakan dan pemimpin Muslim di Indonesia. Pendekatan substantif dapat dijadikan acuan dalam perumusan kebijakan publik yang berlandaskan nilai-nilai Islam, tanpa harus terbatas pada penerapan hukum syariah secara formal. Dengan menempatkan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan sebagai inti kebijakan, pendekatan ini dapat meminimalkan resistensi dari kelompok non-Muslim sekaligus memperkuat kerukunan sosial. Contohnya, dalam merumuskan kebijakan ekonomi dan sosial, para pemimpin dapat memprioritaskan



program-program yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, memajukan pendidikan, dan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan. Kebijakan berbasis nilai-nilai Islam yang substantif ini lebih relevan untuk kondisi sosial Indonesia yang multikultural, karena dapat memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat, tanpa menimbulkan sekat ideologis yang menghambat.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini tidak hanya mendukung pendekatan substantif sebagai alternatif yang lebih adaptif, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya transformasi paradigma dalam pemikiran politik Islam di Indonesia. Hal ini menjadi bukti bahwa politik Islam di Indonesia semakin berkembang untuk memenuhi tuntutan zaman, sekaligus mempertahankan relevansi ajaran Islam yang inklusif dan aplikatif dalam konteks masyarakat modern yang plural.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pergeseran pemikiran politik Islam di Indonesia dari pendekatan formalistik menuju substantif, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan paradigma tersebut. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa perubahan pemikiran politik Islam di Indonesia didorong oleh kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan realitas sosial dan politik yang semakin kompleks. Pendekatan formalistik, yang lebih berfokus pada simbol dan penerapan hukum Islam secara literal dalam struktur negara, mulai dianggap tidak lagi relevan dengan dinamika masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural. Sebaliknya, pendekatan substantif yang berorientasi pada nilai-nilai dasar Islam seperti keadilan sosial, kesejahteraan, dan kesetaraan dianggap lebih adaptif dalam menghadapi tantangan modern.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran politik Islam di Indonesia kini lebih menekankan pada pencapaian tujuan-tujuan sosial Islam yang bersifat inklusif dan universal. Pendekatan substantif dalam politik Islam berupaya mewujudkan kebijakan yang tidak hanya mencerminkan identitas Islam, tetapi juga dapat mengakomodasi kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat tanpa memicu konflik ideologis. Ini menunjukkan bahwa Islam dapat diterapkan dalam konteks yang lebih luas dengan mengutamakan kesejahteraan bersama, bukan sekadar penerapan hukum syariah secara formal. Temuan ini juga memperkuat pandangan bahwa kebijakan publik yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang substantif lebih mampu memperkuat harmoni sosial di Indonesia yang multikultural.

Pokok-pokok pikiran baru yang muncul dari penelitian ini mengarah pada pentingnya redefinisi konsep politik Islam di Indonesia yang tidak hanya terbatas pada simbol-simbol formal, tetapi lebih pada implementasi nilai-nilai syariah yang substantif, seperti keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Konsep maqashid al-shariah, yang berfokus pada pencapaian kemaslahatan umat, menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan politik yang tidak hanya relevan dengan prinsip-prinsip Islam, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan sebuah paradigma baru yang dapat menginspirasi kebijakan publik yang lebih inklusif dan lebih adaptif terhadap keberagaman sosial di Indonesia.

Berdasarkan temuan ini, disarankan agar pemikiran politik Islam di Indonesia terus berkembang dengan mengedepankan pendekatan substantif yang berbasis pada nilai-nilai dasar Islam. Para intelektual dan pembuat kebijakan perlu mendorong diskursus yang lebih terbuka tentang politik Islam yang mengutamakan keadilan sosial, kesejahteraan, dan persatuan, serta menghindari fokus yang berlebihan pada simbol-simbol hukum syariah yang bisa menimbulkan polarisasi dalam masyarakat. Selain itu, penting untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam diskusi mengenai politik Islam yang lebih inklusif, dengan tetap menjaga kerukunan antaragama dan antarbudaya, yang merupakan karakter khas Indonesia.

Saran lainnya adalah perlunya penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai penerapan nilai-nilai substantif dalam kebijakan publik, terutama dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan sosial. Penelitian ini dapat memperkaya wawasan kita tentang bagaimana nilai-nilai Islam yang lebih universal dan aplikatif dapat dijadikan dasar bagi kebijakan yang memajukan kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh, tanpa mengorbankan keragaman yang ada. Dengan demikian, politik Islam yang substantif dapat menjadi jalan tengah untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan di tengah masyarakat Indonesia yang heterogen.

## **6. DAFTAR REFERENSI**

- Effendi, S. (2018). *Pemikiran politik Islam di era modern: Tantangan identitas dan pluralitas*. Gramedia.
- Hasan, M. (2016). *Islam, negara, dan politik identitas di Indonesia: Kritik atas pendekatan formalistik*. Pustaka Pelajar.
- Ma'arif, A. (2019). *Paradigma baru pemikiran politik Islam di Indonesia: Dari formalisme ke substansi*. Mizan.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. SAGE.

Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice*. SAGE.

Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Supriadi, L. (2020). *Pendekatan substantif dalam politik Islam: Solusi harmoni sosial di Indonesia*. LKiS.